SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2026

TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu pembangunan kependudukan sebagai upaya untuk menyinergikan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran, serta administrasi kependudukan agar tercapai kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, diperlukan perencanaan yang matang melalui penyusunan dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
c. bahwa dokumen Peta Jalan ini berfungsi sebagai pedoman strategis bagi Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga diperlukan pengaturan mengenai Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
3. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut PJPK adalah dokumen perencanaan yang memuat arahan dan kebijakan strategis, serta langkah dan tahapan dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu lima tahunan yang merupakan penjabaran dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.
4. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan dengan melihat target pencapaian sampai tahun 2045.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
7. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
11. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
12. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
14. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.

17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Bantul.
19. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menyelenggarakan PJPK.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini:
    a. menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;
    b. membangun manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
    c. meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tenteram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
    d. memperluas cakupan distribusi penduduk yang seimbang secara spasial, ekologis, dan sosial; dan
    e. memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah menyusun PJPK.
(2) Penyusunan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
(3) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika:
    BAB I : PENDAHULUAN
    BAB II : SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025-2029
    BAB III : RENCANA AKSI TAHUN 2025-2029
    BAB IV : PENUTUP
(4) PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pemerintah Daerah melaksanakan PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 5

Pelaksanaan PJPK secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berpedoman pada peraturan perundang undangan mengenai *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan PJPK bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Oktober 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Oktober 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026 NOMOR 65

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

HAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 65 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN
BANTUL





PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Tahun 2025 - 2029



PETA JALAN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dapat disusun sebagai salah satu dokumen strategis pembangunan daerah.

Dokumen PJPK Kabupaten Bantul tahun 2025-2029 merupakan wujud visi strategis pemerintah Kabupaten Bantul dalam mengelola dan mengembangkan kebijakan kependudukan sebagai bagian integral dari pembangunan daerah. Pembangunan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran, serta administrasi kependudukan, dengan tujuan akhir mencapai penduduk yang berkualitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dokumen PJPK merupakan pedoman strategis lima tahunan yang disusun berdasarkan data kependudukan untuk mengelola isu kependudukan secara terpadu. Data kependudukan sangat penting untuk dijadikan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan karena memberikan dasar yang akurat untuk merancang program, mengalokasikan anggaran, dan membuat kebijakan yang tepat sasaran.

Apresiasi dan penghargaan yang setinggi tingginya saya sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik perangkat daerah, tim penyusun maupun pemangku kepentingan lainnya. Semoga dokumen PJPK ini dapat memberikan manfaat secara optimal sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan kependudukan di Kabupaten Bantul.

Akhir kata, saya berharap Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ini mampu menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang sejahtera, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bantul, 31 Januari 2026
Sekretaris Daerah
Kabupaten Bantul



Agus Tarudiharja, S.KM., M.Kes

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 4
C. Sasaran 4
D. Dasar Hukum 5
E. Batasan Pengertian 7
F. Analisis Situasi Kependudukan 13
a. Pengelolaan Kuantitas Penduduk 18
c. Pembangunan Keluarga 37
d. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 42
e. Penataan Administrasi Data Kependudukan 44
f. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan **Error! Bookmark not defined.**
BAB II 51
SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 – 2029 51
A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk 51
B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk 53
C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Strategi Pembangunan Keluarga 57
D. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 59
BAB III 63
RENCANA AKSI TAHUN 2025 – 2029 63
A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan 63
B. Rencana Aksi Tahun 2025 – 2029 70
1. Rencana Aksi Pengelolaan Kuantitas Penduduk 70
2. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk 71
3. Rencana Aksi Pembangunan Keluarga 75

4. Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk 79
5. Rencana Aksi Penataan Administrasi Data Kependudukan... 80
BAB IV PENUTUP 81
A. Monitoring 81
B. Evaluasi 81
C. Pelaporan 82

PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk merupakan subyek sekaligus obyek pembangunan Indonesia, sehingga dalam proses perencanaan pembangunan memerlukan integrasi antara variabel kependudukan dengan variabel pembangunan. Dalam amanat ICPD (*International Conference on Population and Development*) tahun 1994 yang diselenggarakan di Kairo Mesir, salah satu kesepakatan yang dihasilkan adalah pengintegrasian kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan. Bagi negara dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk yang rendah, peningkatan pertumbuhan penduduk bukan sesuatu yang merisaukan, namun untuk wilayah dengan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu hambatan untuk mencapai tujuan pembangunan. Dampak terjadinya perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi *demand* yang selanjutnya harus dipenuhi oleh sektor lainnya, antara lain penyediaan kebutuhan dasar manusia, yaitu papan, pangan dan sandang.

Permasalahan kependudukan di Indonesia selain terkait Kuantitas Penduduk, juga Kualitas Penduduk, antara lain bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pemerataan ekonomi. Salah satu indikator untuk mengukur Kualitas Penduduk adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Nilai IPM Indonesia masih jauh berada dibawah negara-negara ASEAN lainya. Permasalahan kuantitas dan Kualitas Penduduk bukan hanya menggambarkan persoalan kependudukan semata, namun memiliki keterkaitan secara langsung dengan persoalan pembangunan ekonomi

maupun sosial. Secara konseptual permasalahan kependudukan dan pembangunan terutama bidang ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat kuat, bahkan membentuk hubungan yang bersifat resiprokal atau hubungan timbal balik. Kependudukan dapat ditempatkan sebagai variabel bebas, namun demikian ketika dilakukan intervensi terhadap variabel tersebut untuk mengatasi permasalahan kependudukan akan memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan pembangunan lainnya. Dinamika kependudukan yang terjadi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan strategis dalam skala internasional dan nasional. Dalam tataran global, terjadinya berbagai kesepakatan dalam konferensi internasional dibidang kependudukan seperti ICPD di Kairo tahun 1994, MDGs, dan juga kesepakatan internasional lainnya, telah menyebabkan perubahan orientasi kebijakan kependudukan. Kesepakatan dalam ICPD tahun 1994 dalam konteks Indonesia dijabarkan dalam prinsip-prinsip yang lebih detail, yang kemudian diterjemahkan melalui regulasi yaitu UU No. 10 Tahun 1992, namun demikian penerapan Undang-Undang tersebut dinilai belum dapat menjawab semua agenda yang telah dihasilkan dalam ICPD di Kairo tersebut.

Dalam pelaksanaan program keluarga berencana, untuk mendukung pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi telah dilakukan perubahan amandemen UU No 10 Tahun 1992 menjadi UU No. 52 Tahun 2009 yang mengatur tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan penduduk, daya dukung lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mengadopsi 20 tahun *Plan of Action* (PoA) ICPD yang mencakup tujuan penting kebijakan kependudukan dan pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam konteks

pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), pendidikan, kesetaraan gender, penurunan kematian maternal, anak dan bayi, peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk keluarga berencana dan kesehatan seksual.

Pembangunan Kependudukan di Indonesia sempat terabaikan ketika memasuki era reformasi dan dilanjutkan dengan diberlakukannya otonomi daerah. Hal ini menjadi hambatan tersendiri dalam kebijakan kependudukan, meskipun dengan otonomi daerah sebenarnya pemerintah kabupaten/kota memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan, termasuk di dalamnya kebijakan kependudukan (Kemenkokesra, et., al., 2012).

Untuk mengatasi berbagai macam persoalan kependudukan tersebut, diperlukan suatu acuan bagi Pembangunan Kependudukan di masa mendatang berupa kebijakan umum dalam bentuk *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK). Penyusunan GDPK mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan yang merupakan langkah tindak lanjut dari Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

GDPK merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan Pembangunan Kependudukan dengan melihat target pencapaian sampai tahun 2045. GDPK terdiri dari lima aspek Pembangunan Kependudukan, yaitu: (1) Pengendalian Kuantitas Penduduk, (2) Peningkatan Kualitas Penduduk, (3) Pengarahan Mobilitas Penduduk, (4) Pembangunan Keluarga, (5) Penataan Data dan Informasi serta Administrasi Kependudukan.

Arah kebijakan tersebut kemudian dijabarkan dalam

sebuah dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan yang memuat arahan dan kebijakan strategis, serta langkah dan tahapan dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu lima tahunan.

B. Tujuan

Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Bantul memiliki tujuan :

1. Menjaga struktur penduduk tumbuh seimbang;
2. Membangun manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
3. Meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia;
4. Distribusi penduduk yang seimbang secara spasial, ekologis dan sosial;
5. Memperluas cakupan administrasi kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

C. Sasaran

Peta jalan pembangunan kependudukan Kabupaten Bantul diarahkan untuk mencapai sasaran sebagai berikut :

1. Pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian;
2. Peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan, kesehatan dan produktivitas
3. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, budaya tinggi serta mampu merencanakan sumber daya keluarga secara optimal
4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk
5. Penataan administrasi data kependudukan melalui

pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 omor 161, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2014

tentang GDPK;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

E. Batasan Pengertian

Untuk menjaga konsistensi pemahaman dan menghindari penafsiran yang berbeda dalam pemahaman dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, perlu disampaikan batasan pengertian terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan dalam dokumen ini. Batasan istilah ini digunakan untuk menyamakan persepsi mengenai ruang lingkup, arah kebijakan, serta indikator capaian pembangunan kependudukan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, Batasan ini juga berfungsi sebagai acuan bersama bagi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, maupun evaluasi program pembangunan kependudukan. Beberapa istilah penting yang digunakan dalam dokumen PJPK ini sebagai berikut:

1. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
2. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudukan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
4. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal.
8. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
11. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi

kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

14. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan adalah dokumen operasionalisasi GDPK selama 5 tahun yang memuat analisis situasi kependudukan, kebijakan dan strategi, sasaran, indikator, target per tahun, dan rencana aksi untuk mencapai target pembangunan kependudukan.
15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan dan penanggung jawab.
16. *Total Fertility Rate* (TFR) adalah jumlah anak rata-rata yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa reproduksinya (15- 49 tahun)
17. *Age-Specific Fertility Rate* (ASFR) 15-19 Tahun adalah banyaknya kelahiran selama setahun per 1.000 Wanita pada kelompok umur 15-19 tahun.
18. Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern adalah persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern.
19. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas adalah rata-rata lamanya masa yang dilalui dalam menjalani pendidikan formal.
20. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi adalah perbandingan penduduk yang masih bersekolah pada jenjang Perguruan Tinggi (tanpa memandang usia), terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut (19-23 tahun).
21. Jumlah Tenaga Kerja Tersertifikasi kompetensi kerja (Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi)

adalah jumlah Tenaga Kerja yang berhasil mendapatkan sertifikasi kompetensi dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sertifikat kompetensinya.

22. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita adalah bagian dari populasi anak balita pada waktu tertentu, yang bertubuh pendek dan sangat pendek ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar.
23. Angka Kematian Bayi adalah angka yang menggambarkan banyaknya kematian bayi berumur di bawah satu tahun pada setiap 1.000 kelahiran hidup.
24. Angka Kematian Ibu adalah angka yang menggambarkan banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama masa kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan untuk setiap 100.000 kelahiran hidup.
25. Tingkat Kemiskinan adalah bagian dari populasi penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri dan memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.
26. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita adalah persentase perempuan usia kerja (≥15 tahun) yang termasuk dalam angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap total perempuan usia kerja.
27. Persentase Pekerja Informal adalah bagian dari total penduduk yang menjadi pekerja pada lapangan kerja informal.
28. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

adalah persentase penyandang disabilitas yang bekerja pada sektor formal, yaitu sektor yang memiliki hubungan kerja resmi dengan perlindungan hukum seperti perjanjian kerja, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan upah yang sesuai ketentuan perundang-undangan.

29. Gini Ratio adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang dapat dibelanjakan (atau pengeluaran konsumsi) penduduk secara menyeluruh.
30. PDRB Per kapita adalah rata-rata nilai tambah ekonomi seluruh sektor yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota).
31. Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.
32. Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi (Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi) adalah Persentase Penambahan Wajib Pajak Hasil Ekstensifikasi.
33. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) adalah ukuran program pembangunan keluarga yang ditunjukkan melalui dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga.
34. Indeks Perlindungan Anak adalah angka yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
35. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%) adalah rumah tangga dianggap menempati rumah layak huni jika menempati rumah/bangunan tempat tinggal yang memenuhi keempat komponen rumah layak huni.

36. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) adalah akses sanitasi aman apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah (SPAL).
37. Indeks Lansia Berdaya adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan.
38. Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja adalah pengasuhan keluarga pada remaja, di mana remaja adalah anggota keluarga usia 10 - 24 tahun dan belum menikah.
39. Cakupan (Persentase) Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) adalah bagian dari populasi penduduk yang mendapatkan perlindungan kesejahteraan.
40. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu di mana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
41. *Rate Nett Recent Migrasi* adalah perbandingan selisih antara jumlah migran masuk risen dan migran keluar risen terhadap penduduk yang berpeluang bermigrasi pada suatu wilayah.
42. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita adalah bagian dari penduduk yang berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran baik yang bisa ditunjukkan

maupun tidak.

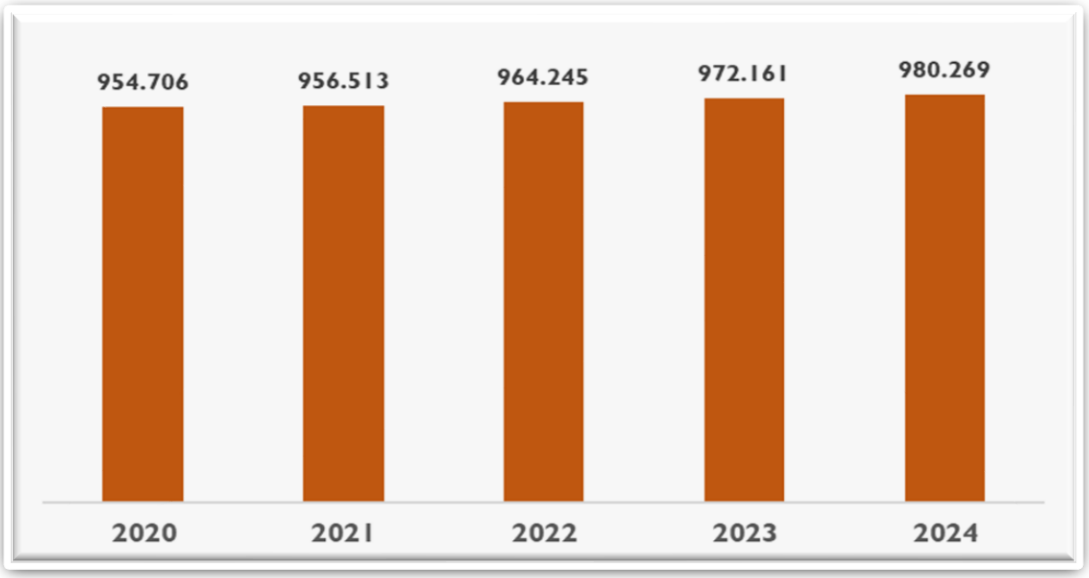
43. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Cerai adalah akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan yang membuktikan secara pasti dan sah tentang Perceraian seseorang setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
44. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi pasangan menikah yang telah memiliki dokumen resmi berupa akta perkawinan (atau buku nikah), sebagai bukti legal pernikahan di suatu negara.024
45. Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian adalah persentase kejadian kematian yang telah dilaporkan dan dicatat secara resmi melalui penerbitan akta kematian oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

F. Analisis Situasi Kependudukan

Dinamika pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk yang terjadi saat ini. Besarnya jumlah penduduk di satu sisi memiliki manfaat sebagai modal dasar pembangunan, namun disisi lain akan menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi jika kualitas penduduknya rendah serta distribusinya tidak merata. Penduduk dengan kualitas yang baik, meskipun jumlahnya besar akan menjadi pendorong terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi. Permasalahan kependudukan harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai sektor agar dapat terjadi penyerasian kebijakan kependudukan. Secara umum Gambaran situasi kependudukan di wilayah Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Jumlah dan Proyeksi Penduduk 5 Tahun Kedepan

Berdasarkan data dalam lima tahun terakhir jumlah penduduk di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan setiap tahun sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Jumlah Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025, diolah

Dari gambar diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 980.269 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,83. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Bantul tidak merata untuk setiap wilayahnya, yang tertinggi adalah Kapanewon Banguntapan dengan jumlah penduduk mencapai 117.875 jiwa, selanjutnya Kapanewon Kasihan dengan jumlah penduduk sebesar 108.779 jiwa, dan diurutan ketiga adalah Kapanewon Sewon dengan jumlah penduduk sebanyak 103.238 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul setiap tahun sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2020-2024

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul 2025, diolah.

Laju pertumbuhan penduduk dalam 4 atau 5 tahun terakhir merupakan indikator krusial yang berfungsi sebagai data tren historis dan pijakan dasar untuk menentukan asumsi proyeksi penduduk di masa depan. Laju pertumbuhan penduduk tersebut memberikan gambaran apakah pertumbuhan penduduk di suatu wilayah sedang mempercepat, melambat, atau stabil. Tren ini digunakan untuk menyusun asumsi laju pertumbuhan yang akan dimasukkan ke dalam rumus proyeksi ke depan.

Proyeksi penduduk bermanfaat untuk menentukan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk. Proyeksi penduduk merupakan hasil perhitungan dengan memanfaatkan perangkat lunak Spectrum 5 dengan Modul Demographic Projection (DemProj). Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2025 sebanyak 987.552 jiwa dan di tahun 2030 menjadi 1.021.927 jiwa. Sampai tahun 2045 laju pertumbuhan penduduk diperkirakan sebesar 0,5 persen rata-rata pertahunnya dan angka kelahiran total (Total Fertility Rate) berkisar 1,53. TFR ini masuk

dalam kategori rendah dalam arti penambahan jumlah penduduk tidak terlalu besar dan jika penduduk berkurang juga tidak terlalu drastis. nilai ini di bawah nilai ideal yang sebesar 2,1. Kondisi ini memberikan konsekuensi terhadap peningkatan jumlah penduduk lanjut usia, sehingga perlu dipersiapkan kebijakan yang peduli kepada lansia. (sumber : Dok.GDPK Bantul 2025-2045).

Kondisi pertumbuhan penduduk ideal yang ingin dicapai Kabupaten Bantul adalah penduduk yang seimbang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga sebagai regulasi turunan dari UU No. 52 Tahun 2009 terutama Pasal 1 yang menyebutkan: “Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk”.

2. **Matriks analisis situasi kependudukan Kabupaten Bantul**.

Untuk mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja pembangunan kependudukan di Kabupaten Bantul dilakukan analisa PSRI. Pendekatan ini mengadaptasi model PSRI (Pressure-State-Response-Impact) yang banyak digunakan dalam pemantauan lingkungan, dengan menambahkan komponen 'Impact' untuk menilai hasil akhir dari suatu kebijakan atau program, dengan demikian pendekatan ini memungkinkan identifikasi hubungan sebab akibat yang mempengaruhi kondisi

Analisis PSRI menguraikan setiap indikator kependudukan strategis ke dalam empat komponen utama yaitu:

1. Pressure (Tekanan) untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendorong atau akar masalah yang memberikan tekanan

terhadap kondisi kependudukan. Tekanan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti dinamika sosial-budaya, kondisi ekonomi, kebijakan yang belum optimal, hingga perubahan lingkungan.

2. State (Kondisi Saat Ini) untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya dari setiap indikator kependudukan di Kabupaten Bantul, yang didasarkan pada data kuantitatif dan kualitatif. Kondisi ini merupakan cerminan dari dampak berbagai tekanan yang ada.
3. Response (Rencana Aksi / Kebijakan) mencakup intervensi di tingkat regulasi, alokasi anggaran, penyediaan hingga layanan. Analisis terhadap komponen ini membantu mengevaluasi apakah respon sudah cukup efektif dan relevan.
4. Impact (Dampak) yaitu komponen yang menguraikan dampak atau hasil jangka panjang yang diharapkan dari serangkaian respons kebijakan yang telah diimplementasikan.

Matriks analisis situasi kependudukan dikelompokkan berdasarkan lima sasaran pembangunan kependudukan yaitu:

a. Pengelolaan Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
1	Total Fertility Rate	• Kebijakan dan Program KB / Keluarga Berencan Capaian KB yang masih tinggi dan kurangnya perhitungan yang matang dalam hal jumlah kesertaan MKJP • Edukasi, tingkat pendidikan, dan kesadaran masyarakat Wanita yang lebih berpendidikan cenderung menunda menikah atau menunda punya anak. Kesadaran akan biaya hidup atau beban ekonomi anak membuat pasangan cenderung memilih memiliki sedikit anak. • Konteks sosial dan budaya Norma sosial yang berubah misalnya morma bahwa "keluarga kecil bahagia atau tren keluarga "nuclear" hanya 1-2 anak.	• Keseimbangan usia produktif, meskipun saat ini proporsi usia produktif masih tinggi (64%) jika generasi muda berkurang beban ketergantungan (dependency ratio) bisa meningkat di masa mendatang • TFR Rendah yaitu sekitar 1,53 (data DP3APPKB) dan 1,78 (PK 2024) . Hal ini memperlihatkan bahwa laju kelahiran di Bantul berada di bawah tingkat penggantian generasi (replacement level) atau sudah di bawah 2. Capaian DIY yakni sebesar 1,83	• Kebijakan penyesuaian program KB mengevaluasi dan menyesuaikan target partisipasi KB agar tidak terlalu agresif memaksa penurunan TFR di wilayah yang sudah sangat rendah • Kebijakandemografi pro-keluarga Memberikan insentif bagi keluarga yang mau memiliki anak (misalnya bantuan biaya pendidikan, kesehatan, fasilitas ibu hamil). Peningkatan jaminan sosial, layanan kesehatan anak, pendidikan • Promosi keseimbangan antara karier dan keluarga dalam mendukung perempuan agar dapat bekerja sekaligus memiliki anak	Terciptanya masyarakat yang berkualitas

2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	• Tekanan sosial dan budaya terhadap pernikahan dan kehamilan muda • Norma masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau komunitas tertentu, dapat mendorong perempuan menikah muda, sehingga meningkatkan ASFR di kelompok usia 15-19 • Ekonomi Beban ekonomi seringkali menjadi pemicu meningkatnya pernikaha dini sehingga akan berdampak pada ASFR Kabupaten Bantul	Capaian ASFR Kabupaten Bantul tahu 2024 sebesar 7,20 Capaian DIY yakni sebesar 9,00	Kebijakan pembatasan perkawinan usia anak atau peraturan terapan Menegakkan batas usia minimal menikah (UU Perkawinan) dan mencegah pernikahan anak di bawah umur. Kemudian adanya kolaborasi instansi pendidikan, hukum, dan sosial dalam penegakan peraturan. ▪ Program edukasi & penyuluhan kesehatan reproduksi remaja Memasukkan pendidikan seksualitas/reproduksi di sekolah menengah (SMA/SMK) dan madrasah. Kampanye kesadaran remaja & orang tua mengenai risiko kehamilan dini, konsekuensi kesehatan, sosial, ekonomi	▪ Penurunan fertilitas remaja dan pergeseran kehamilan ke usia lebih produktif dengan ASFR usia 15-19 dan 20-24 menurun, ▪ Banyak kehamilan baru terjadi di kelompok usia 25-29 atau 30-34 yang sering dianggap lebih “aman” secara kesehatan dan ekonomi ▪ Peningkatan kualitas anak & keluarga Dengan kehamilan di usia yang lebih “matang” dan direncanakan, anak yang lahir kemungkinan mendapat perawatan, gizi, pendidikan lebih baik. Kemudian Keluarga bisa lebih siap secara finansial dan sosial untuk anak.

3	Proporsi Kb yang terpenuhi	▪ Permintaan terhadap kontrasepsi pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak segera atau membatasi Jumlah anak ▪ Hambatan sosial / budaya / normative ▪ Stigma terhadap penggunaan KB atau alat kontrasepsi tertentu. Keyakinan agama atau tradisi yang menghambat penggunaan KB. Tekanan dari keluarga/masyarakat yang menyarankan banyak anak. ▪ Faktor Individu & Medis ▪ Kondisi kesehatan yang menyebabkan pasangan ragu atau tidak bisa menggunakan metode tertentu.	Capaian Proporsi KB yang terpenuhi Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 84,04 capaian DIY tahun 2024 yakni sebesar 83,52%	▪ Kampanye edukasi / komunikasi perubahan perilaku ▪ Sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat KB, hak reproduksi, metode yang aman. Penyuluhan di sekolah, media massa, posyandu, pertemuan warga ▪ Kolaborasi antar sektor Perluadanya peningkatan kerjasama antara dinas Kesehatan, DP3APPKB, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Lembaga Masyarakat dalam mengintegrasikan program	▪ Kualitas Hidup keluarga lebih baik ▪ Keluarga bisa merencanakan jumlah anak sesuai kemampuan ekonomi dan sosial. Investasi pada pendidikan, kesehatan anak bisa lebih optimal karena sumber daya tidak terlalu terbagi.

b. Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Sebagian dari masyarakat dengan pendapatan rendah masih kesulitas membiayai pendidikan, meskipun sudah ada bantuan dari pemerintah	Tahun 2023 = 9,79 Tahun 2024 = 9, 81 Tahun 2025 =10, 11 Data dari BPS Data ini tidak bisa dibangdingkan dengan Provinsi DIY karena indikator yang digunakan DIY yakni RLS Usia 15 tahun ke atas dan capaian tahun 2024 sebesar 10.23	Pemberian bantuan pendidikan berupa : 1. Beasiswa bagi siswa dari keluarga misikin melalui Kartu Indonesia Pintar (anggaran dari Pusat) 2. BOSP (Anggaran dari pusat) 3. BOSDA (Anggaran dan Pemda)	Diharapkan meningkat dan tetap berada di atas rata-rata provinsi/nasional melalui penurunan angka putus sekolah peningkatan akses pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) (Proxy : Angka partisipasi kasar (APK) Perguruan Tinggi (%)	Anak Usia sekolah tidak terdaftar di sekolah formal	Data tahun 2024 APK SD : 93,90 % APK SMP : 92,07% Data tahun 2025 APK SD : 94,76 % APK SMPK : 88,39 % Kewenangan dinas pendidikan di Kabupaten hanya sampai jenjang pendidikan dasar (SD-SMP)	Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) dengan memperluas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	Peningkatan Jumlah peserta didik program kesetaraan

			DIY yakni RLS usia 15 tahun ke atas dan capaian tahun 2024 sebesar 10,23		

3	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensi Kerja (Proxy : Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi)	Jumlah Tenaga kerja yang tersertifikasi kompetensi dipengaruhi oleh: ▪ PP No.10 Th 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang membatasi legalitas lembaga tertentu yang dapat mengeluarkan sertifikat kompetensi terhadap suatu profesi ; ▪ Dukungan Disnakertrans Bantul, LPK dan Satpel BPVP dalam melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi dan program sertifikasi melalui LSP; ▪ Kesadaran tenaga kerja pentingnya keahlian kompetensi dengan bukti sertifikat kompetensi sebagai	Kondisi Jumlah tenaga kerja tersertifikasi kompetensi kerja di Kabupaten Bantul meningkat signifikan dari 1.803 orang (2023) menjadi 2.319 orang (2024) — naik 28,6%. Tren ini menunjukkan telah terjadi perbaikan kualitas SDM sektor formal dalam program pelatihan pemerintah daerah. Kemudian untuk capaian DIY tahun 2024 sebesar 191 orang.	▪ Upaya dalam meningkatkan tenaga kerja tersertifikasi kompetensi: ▪ Peningkatan kualitas lembaga pelatihan vokasi; ▪ Peningkatan kerjasama antar lembaga pelatihan vokasi dalam penyelenggaraan pelatihan; ▪ Mengintegrasikan informasi lowongan kerja berdasarkan jabatan dan kompetensi yang dibutuhkan sertifikasi;	▪ Dampak yang diharapkan: ▪ Dapat menghasilkan alumni pelatihan yang berkualitas dan berkompetensi; ▪ Dapat saling memenuhi kebutuhan ditengah keterbatasan saranaprasarana dan ketersediaan instruktur pelatihan; ▪ Dapat memetakan untuk segera memenuhi kebutuhan lowongan jabatan berdasarkan kompetensinya.

		nilai tambah dalam persaingan global di era transformasi digital; ▪ Tuntutan dunia kerja yang mensyaratkan sertifikat kompetensi sebagai standar kelayakan kerja dalam implementasi sistem manajemen mutu SDM perusahaan. ▪ UU No. 13 Th 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menekankan pentingnya tenaga kerja kompeten dan tersertifikasi dalam menghadapi pasar kerja yang kompetitif; ▪ Pembiayaan ujikom yang relatif tinggi bagi kalangan tenaga kerja/perusahaan tertentu.			
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	-kekurangan gizi kronis, baik pada ibu hamil maupun anak, - pola asuh yang tidak	Stunting tahun 2024 adalah 7,28% Sedangkan capaian DIY yakni sebesar 17,4 %	Pemberian PMT bagi balita gizi kurang, BB underweight, balita dengan BB tidak naik, serta bagi	Kasus balita gizi kurang, BB underweight turun, kasus ibu hamil KEK turun, jumlah anemia ibu hamil turun. akses pelayanan menjadi

	pada balita (%)	tepat, - sanitasi dan kebersihan lingkungan yang kurang baik, - serta kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan edukasi gizi		ibu hamil dengan KEK. tatalaksana penyakit penyerta pada balita dengan masalah gizi serta ibu hamil KEK. Pemeriksaan balita malnutrisi oleh dokter spesialis anak. Pemberian PKMK pada balita dengan gizi buruk dan stunting meski belum semua stunting mendapat PKMK. implemantasi program community feeding center di program PMT, peningkatan kapasitas kader untuk edukasi pmba kepada ibu balita dan ibu hamil. Kerjasama dengan OPD terkait untuk penanganan masalah sanitasi dan lingkungan.	lebih terjangkau

5	Angka Kematian Bayi (AKB) (Proxy :Jumlah Kasus Kematian Bayi)	Komplikasi saat lahir seperti asfiksia (kekurangan oksigen) berat badan lahir rendah (BBLR), dan kelainan bawaan (kongenital). Faktor tidak langsung meliputi keterlambatan diagnosis, infeksi, masalah gizi pada ibu, lingkungan tidak sehat, serta keterbatasan pelayanan kesehatan pada bayi dengan kelainan bawaan, pemeriksaan kehamilan yang kurang rutin, masalah sosial seperti kehamilan yang tidak diinginkan	Tren AKB 2023 = 7,59, tahun 2024 adalah 8,93, tahun 2025= 7,93 Angka kematian bayi tahun 2024 kabupaten bantul lebih tinggi dibanding kasus kematian bayi DIY yakni sebesar 8,78 per 1000 kelahiran hidup (285 kasus)	peningkatan kapasitas petugas, rujukan terencana bagi ibu hamil berisiko, revisi manual rujukan, audit kasus kematian bayi dan membuat rekomendasi, peningkatan sarpras yankes pelayanan bayi	kasus AKB turun, akses pelayanan bayi menjadi terjangkau, kapasitas faskes dan nakes meningkat
6	Angka Kematian Ibu (AKI) (Proxy : Jumlah Kasus Kematian Ibu)	Penyebab langsung kematian ibu : - perdarahan - preeklampsia berat - sepsis - kelainan jantung - DIC	AKI Tahun 2023= 84,36, tahun 2024=84,12 Tahun 2025=106,5 Sedangkan pada tahun 20224, AKI DIY yakni sebesar 77.03/100 rb KH (25 Kasus)	Optimalisasi puskesmas dengan pendampingan SPOG ada diskusi untuk kasus berat meliputi dokter, bidan perawat, psikolog	Kasus kematian ibu turun, kapasitas nakes dan kualitas pelayanan kesehatan, ibu hamil
7	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan diKabupaten Bantul bersifat multidimensi, tidak hanya	Berdasarkan data BPS bantul, presentase	Dinas Sosial menyelenggarakan program	Kabupaten Bantul menunjukan kinerja positif dalam penanggulangan

		disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga karena keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan pekerjaan serta perlindungan sosial yang berkelanjutan	penduduk miskin di Kabupaten Bantul tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut : 2021: 14.04 % 2022: 12.27 % 2023: 11.96 % 2024: 11.66 % 2025: 11.54 % Tingkat Kemiskinan DIY hingga maret sebesar 10.23 %	pengentasan kemiskinan baik melalui APBN maupun APBD antara lain: Program keluarga harapan (PKH) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Jaminan Kesehatan/Subsidi iuaran Jaminan Kesehatan (PBI-APBD) Bantuan pemakaman dan sandang bagi lansia, anak terlantar, dan disabilitas Bantuan langsung tunai (BLT) dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Bantuan Sosial untuk wanita rawan	kemiskinan sepanjang tahun 2021 - 2025. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik, presentase pendduduk miskin berhasil turun dari angka 14,04 % pada tahun 2021 dan pada tahun 2025 berada di angka 11,54 persen.

				Sosial Ekonomi (WRSE) Bantuan Sosial Sambung Pangan Bantul Dan berbagai skema bantuan laninya Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, penentuan penerima bantuan sosial di Kabupaten Bantul menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama, namun karena pembaharuan DTSEN dilakukan pertriwulan sering kali data tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini masyarakat. Untuk itu, Dinas Sosial	

				Kabupaten bantul mengembangkan Sistem Informasi Data menuju Sejahtera (Sidamesra) sebagai alat bantu verivikasi kondisi kesejahteraan	
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan diantaranya: ● Kemudahan akses lowongan kerja dan perluasan kesempatan kerja secara inklusif; ● Peningkatan pemberdayaan perempuan dan pelatihan ketrampilan yang banyak diusulkan komunitas perempuan; ● Perubahan nilai sosial terhadap perempuan yang bekerja; ● Faktor pendidikan dan kemajuan teknologi yang dapat mendukung	Kondisi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan di Bantul berdasar data BPS tahun 2023 sebesar 66.12% dan tahun 2024 sebesar 67.15%, peningkatan sebesar 1,03 poin persentase (sekitar 1,56%) dalam satu tahun, menunjukkan tren positif partisipasi perempuan dalam pasar kerja yang sejalan dengan	Upaya dalam mengungkit tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan: ● Peningkatan akses lowongan kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi perempuan; ● Peningkatan pemberdayaan perempuan dengan penyediaan pelatihan ketrampilan yang banyak diminati kaum perempuan	Dampak yang diharapkan: ● Perempuan dapat memaksimalkan peluang kerja diberbagai akses lowongan dan kesempatan kerja; ● Perempuan dapat lebih berdaya atas kompetensi dan kemudahan teknologi yang tersedia dalam mempermudah proses bekerja secara fleksibel.

		perempuan bekerja secara fleksibel.	penguatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Capaian DIY yakni sebesar 63.53%		
9	Persentase Pekerja Informal	Faktor-faktor yang mempengaruhi penciptaan lapangan kerja formal: ● Pertumbuhan ekonomi dan investasi; ● Kebijakan berkelanjutan pemerintah dari alumni peserta pelatihan menuju pembentukan wirausaha baru ; ● Iklim kondisi perekonomian global	Penciptaan lapangan kerja formal di bantul tahun 2023 sejumlah 3055 lowongan kerja dengan pencari kerja sebesar 3787 orang dan tahun 2024 sejumlah 5248 lowongan kerja dengan pencari kerja sebesar 4665 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa pasar kerja formal di Bantul mulai membaik, dengan peningkatan kapasitas penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha, terutama	Upaya mengungkit peningkatan informasi lapangan kerja formal: ● Penguatan sistem informasi pasar kerja; ● Peningkatan kegiatan job canvasing; ● Peningkatan kompetensi dan daya saing tenagakerja; ● Pelatihan dengan pendekatan penempatan berdasarkan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.	Dampak yang diharapkan adalah peningkatan tersedianya lapangan kerja formal yang aksesibel, dengan kompetensi dan daya saing angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan/permintaan perusahaan.

			sektor industri kreatif, pariwisata, dan UMKM yang berkembang Kemudian capaian DIY per Agustus 2025 sebesar 53.97%		
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas bekerja disektor formal: ● Adanya regulasi dan kebijakan pemerintah terkait mempekerjakan penyandang disabilitas; ● Adanya minat dan kesesuaian ketrampilan dengan pekerjaan formal yang tersedia; ● Adanya perusahaan yang menerapkan CSR inklusif dengan menyediakan lowongan kerja tertentu dengan sarana pendukung difabel; ● Adanya lembaga pendidikan pelatihan vokasi inklusif berbasis kompetensi bagi penyandang disabilitas	Kondisi penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Bantul tahun 2023 sebesar 156 orang dan tahun 2024 sebesar 166 orang Tahun 2025 160 Tahun 2026 124 Capaian DIY sebesar 222 Orang	Upaya dalam mengungkit peningkatan penyandang disabilitas yang bekerja disektor formal: ● Pemberian penghargaan bagi perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai regulasi; ● Sosialisasi dan pembinaan perusahaan/lembaga dalam pemenuhan porsi mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai regulasi; ● Fasilitasi	Dampak yang diharapkan: ● Mendorong perusahaan mentaati regulasi dalam proporsi mempekerjakan penyandang disabilitas; ● Mendorong produktifitas komunitas disabilitas unt dapat mengkoordinasikan peserta yang mampu dan berminat dalam pelatihan maupun pekerjaan tertentu.

				komunitas disabilitas terkait pelatihan yang diminati; ● Fasilitasi seleksi dan informasi lowongan kerja penyandang disabilitas sektor formal	
11	Gini Ratio	Rasio Gini di Kabupaten Bantul dipengaruhi : ● Struktur penduduk yang sebagian besar mata pencaharian sebagai petani. Akibat kemarau panjang di Kabupaten Bantul menyebabkan musim tanam dan musim panen mengalami perubahan dan berakibat pada produksi pertanian menurun dan berdampak pada pendapatan petani. ● Adanya penambahan jumlah tenaga kerja buruh harian lepas, tapi kenaikannya tersebut dari segi pendapatan masih sangat kecil	Rasio Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir tergolong dalam kategori "kesenjangan sedang" karena berkisar antara 0,4 sampai dengan 0,5. Indeks gini tahun 2024 adalah 0,417 menurun 0,037 dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,454. Apabila di Banding dengan DIY, kabupaten Bantul masih dalam katergori sedang Penurunan Rasio Gini didorong oleh berkembangnya industri kreatif dan pemberian bantuan sosial	Upaya yang dilakukan untuk menurunkan Rasio Gini yaitu pengembangan kewirausahaan UMKM, pengembangan industri kreatif, penciptaan lapangan kerja, budi daya ternak, penyediaan sarana prasarana untuk mendukung pelayanan usaha bagi pelaku usaha dan berbagai program pendukung UMKM lainnya, perluasan akses pendidikan serta pemberian bantuan sosial.	Dampak yang diharapkan dengan pemerataan pendapatan: ● Menurunnya angka kemiskinan ● Meningkatnya daya beli masyarakat ● Perubahan kualitas hidup ● Kondisi sosial dan politik yang stabil ● Mengurangi tingkat pengangguran.

12	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	• Rendahnya daya beli masyarakat • Adanya dampak negatif dari krisis global terlihat dari menurunnya pembiayaan kegiatan investasi • Melambatnya penyerapan tenaga kerja • Sektor pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Bantul tetapi pertumbuhannya melambat.	Nilai PDRB per kapita baik ADHK maupun ADHB Kabupaten Bantul sejak tahun 2020-2024 senantiasa mengalami kenaikan hal tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Bantul. Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2024 sebesar 4,19% meningkat jika dibanding tahun 2023 sebesar 4,16% Sedangkan data PDRB DIY 51,47 juta rupiah.	Diperlukan upaya yaitu pemberdayaan masyarakat melalui sektor-sektor ekonomi potensial, baik formal maupun informal, diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran terbuka, selain itu perlu membuka peluang pengembangan sektor jasa, seperti kesehatan, pendidikan, dan jasa perusahaan, dengan melibatkan investor dari dalam dan luar wilayah Kabupaten Bantul. Potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul sangat Besar dengan Upaya Pemda mengembangkan kawasan selatan	Dampak yang diharapkan dari pendapatan per kapita yang terus bertambah: ▪ Memungkinkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. ▪ Membantu mengurangi tingkat kemiskinan. ▪ Masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. ▪ Mendorong pertumbuhan ekonomim dengan mendorong konsumsi, investasi, dan inovasi, yang pada akhirnya bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kemakmuran/kesejahteraan.

13	Tingkat Pengganggguran Terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka di Bantul dipengaruhi: ▪ Bonus demografi, dimana angka pertumbuhan penduduk usia produktif meningkat signifikan; ▪ Mismatch pendidikan dan ketrampilan, maupun soft skill angkatan kerja dengan kebutuhan kompetensi dan kompetisi di dunia kerja; ▪ Pertumbuhan ekonomi daerah maupun investasi lokal yang relatif masih rendah; ▪ Kondisi ekonomi global	Kondisi capaian tingkat pengangguran terbuka di Bantul berdasar rilis BPS tahun 2022 sebesar 3.79, tahun 2023 sebesar 3.78 dan tahun 2024 sebesar 3.62, mununjukan tren penurunan angka pengangguran yang konsisten, dengan harapan tahun 2025 dapat tercapai penurunan TPT direntang angka 3.08-3.58, tentunya dengan upaya berkelanjutan melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara merata, investasi daerah, pendidikan dan pelatihan yang link and match dengan dunia kerja, pengembangan wirausaha	Upaya dalam mengurai permasalahan: ● Penguatan pelatihan vokasi dan ketrampilan dengan pendekatan penempatan melalui penyelarasan kurikulum pendidikan dan pelatihan kejuruan sesuai kebutuhan industri; ● Memonitoring dan evaluasi alumni peserta pelatihan yang belum bekerja dan berminat berwirausaha untuk dilakukan pembinaan maupun pendampinga	Dampak yang diharapkan: ● Peserta alumni pelatihan dapat terserap semua disektor formal; ● Peserta alumni pelatihan yang tidak terserap disektor formal, dapat diarahkan berwirausaha melalui pendampingan; ● Terhindarnya potensi konflik hubungan industrial/PHK dan meningkatnya iklim investasi daerah yang dapat menyerap angkatan kerja; ● Terserapnya angkatan kerja sektor informal dalam peluasan kerja padat karya maupun transmigrasi;

		akibat perang, kebijakan tarif donald trump yang berdampak terhadap stabilitas keuangan perusahaan sektor tertentu, dan berpotensi terjadinya PHK; ▪ Paradigma sistem kerja paruh waktu melalui pemanfaatan teknologi dalam bekerja dengan hasil yang besar, tetapi tidak tercatat sebagai pekerja produktif.	peningkatan produktivitas UMKM, peningkatan perluasan kerja sektor padat karya. Sedangkan capain bantul pada tahun 2024 lebih tinggi dari capaian DIY yakni sebesar 3,48	● Penciptaan hubungan industrial yang kondusif dalam menjaga iklim investasi dan potensi PHK; ● Peningkatan perluasan kerja melalui program padat karya maupun transmigrasi dalam memenuhi keterserapan tenaga kerja sektor informal; ● Peningkatan pelayanan pengelolaan informasi lowongan kerja yang aksesibel; ● Peningkatan lembaga pelatihan vokasi dalam mendidik angkatan kerja yang berdaya saing; ● Peningkatan produktivitas tenaga kerja UMKM sehingga berdampak pada meningkatnya produktivitas perusahaan.	● Kemudahan akses informasi lowongan kerja diharapkan dapat mempercepat penyerapan tenaga kerja yang dibutuhkan; ● Peningkatan daya saing angkatan kerja lebih meningkatan peluang bekerja; ● Peningkatan produktivitas UMKM berdampak pada peningkatan serapan tenaga kerja yang dibutuhkan.

14	Persentase Kepemilikan NPWP (Proxy : Persentase Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi)	Sebagian besar penduduk bekerja di sektor informasi dengan penghasilan dibawah PKTP sehingga belum memiliki NPWP	Jumlah NPWP orang Pribadi dengan status aktif tahun 2024 Sebanyak 81.409, dengan jumlah penduduk +-980,269 jiwa dan angkatan kerja yang bekerja +-607.606 orang, maka rasio kepemilikan NPWP terhadap penduduk produktif masih sekitar 13,40% Sebaran NPWP Bantul tahun 2024 masih didominasi sektor pegawai (41,67%). Jumlah NPWP orang Pribadi dengan status aktif tahun 2023 Sebanyak 73.216, dengan jumlah penduduk +-972,161 jiwa dan angkatan kerja yang bekerja +- 602.581 orang, maka rasio kepemilikan NPWP terhadap penduduk produktif masih sekitar 12,15% Sebaran NPWP Bantul tahun 2023 masih didominasi sektor pegawai (44,86%).	Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) untuk penambahan WP baru potensial dan optimalisasi kanal digital untuk mempermudah pendaftaran NPWP dan memperluas jangkuan layanan	Dampak dan arah perbaikan yang diharapkan: Meningkatnya kesadaran pajak masyarakat dari masyarakat dan kebutuhan formal serta material, perluasan basis pajak yang berkelanjutan untuk mendukung penerimaan nasional. Terbangunnya kolaborasi stategis antara DJP dan Pemerintah Daerah dalam ekosistem data kependudukan dan ekonomi Bantul. Penguatan kemandirian fiskal melalui pertumbuhan wajib pajak aktif

c. Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Dinamika Penduduk Kabupaten Bantul yang bervariatif	Capaian I Bangga Kabupaten Bantul 64,38 atau cukup baik. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan capaian DIY yaitu sebesar 64,12	Penguatan kelembagaan dan koordinasi antar wilayah baik desa/kapanewon dalam mengembangkan wilayah berorientasi pada dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan Internalisasi dan sosialisasi konsep pembangunan keluarga bagi desa/kapanewon, serta pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan wilayah	Keluarga lebih tangguh dan berkualitas serta adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat Terciptanya sinergi pembangunan daerah dan keberlanjutan program Pembangunan kependudukan
2	Indeks Perlindungan Anak	Perlindungan dan pemenuhan Hak Anak belum sepenuhnya terpenuhi	Skor Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Bantul sebesar 70,20 Capaian ini lebih rendah dibanding dari capaian DIY yakni sebesar 73,50	Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya melaksanakan kegiatan tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk menuju Kabupaten Layak Anak	Terpenuhinya hak anak yang ada di Kabupaten Bantul dan mendukung tercapainya Kabupaten Layak Anak

3	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Keterbatasan lahan permukiman, keterikatan tata ruang yang ketat. Keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap rumah layak dan aman.	Rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah layak dan aman Capaian Rumah Tangga dengan Akses layak Tahun 2024 yaitu 99.09 % Tahun 2025 = 99, 14 % Data ini tidak dapat dibandingkan dengan Provinsi DIY karena indikator yang digunakan DIY yakni Jumlah penanganan RTLH dari berbagai sumber pendanaan dan capaian tahun 2024 sejumlah 3135 unit	Program Penanganan RTLH dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kolaborasi dengan sektor swasta dan CSR	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Penurunan jumlah kawasan kumuh dan meningkatnya daya tarik lingkungan permukiman. Terwujudnya kesejahteraan sosial dengan menurunnya angka kemiskinan akibat peningkatan kepemilikan rumah layak.
4	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	Pertumbuhan penduduk yang meningkatkan volume limbah domestik. * Keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah (seperti SPALD Terpusat atau IPAL komunal) terutama di wilayah padat penduduk	Capaian Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman yaitu 25,25% tahun 2024 Tahun 2025 = 25,78% CapaianDIY yakni sebesar 21,22 %,	* Penguatan kelembagaan untuk pembangunan sanitasi Permukiman atau program serupa yang berfokus pada pembangunan IPAL komunal dan SPALD Terpusat.	* Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, ditandai dengan penurunan signifikan kasus penyakit berbasis lingkungan (diare, tipes) dan penurunan prevalensi stunting. * Peningkatan kualitas lingkungan hidup, termasuk

		dan permukiman kumuh. * Perilaku masyarakat yang masih menggunakan tangki limbah konvensional yang tidak kedap dan mencemari air tanah (cubluk). Keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur		* Penyediaan tangki septik onsite yang kedap dan ramah lingkungan melalui bantuan pemerintah (septic tank individual atau komunal). Sosialisasi perubahan perilaku	pengurangan pencemaran air tanah dan badan air permukaan (sungai dll.) Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi melalui terciptanya lingkungan permukiman yang lebih bersih, sehat, tidak bau, dan menarik.

		sanitasi skala besar. * Keterbatasan lahan untuk pembangunan IPAL komunal atau SPALD Terpusat di wilayah padat penduduk.	.	terkait kebersihan dan sanitasi * Penguatan kelembagaan penyediaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) di SPALD-T Sewon dan SPALD-Bambanglipuro	* Tercapainya target pembangunan berkelanjutan (SDGs) khususnya Target 6.2 (akses sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata).
5	Indeks Lansia Berdaya	Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi yang dialami oleh lansia Belum meratanya akses pendidikan, sosial maupun kesehatan	Capaian Lansia Berdaya 2024 adalah 57,97 Indeks Lansia Berdaya merupakan indikator baru yang dimulai tahun 2024 jadi tidak dapat menyajikan data trend	• Pengoptimalan sekolah lansia dan Bina Keluarga Lansia • Pemberian pelatihan PJP (Pelatihan Jangka Panjang) bagi lansia	Lansia lebih mandri dan aktif secara sosial peningkatan kualitas hidup lansia Peningkatan kontribusi lansia dalam pembangunan wilayah
6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Tekanan ekonomi keluarga seperti kemiskinan, peangguran, beban kerja tinggi yang akhirnya berdampak pada pola pengasuhan remaja Kurangnya edukasi pengasuhan bagi remaja Kondisi sosial masyarakat yang kurang mendukung seperti semakin meluasnya pergaulan bebas, peredaran narkoba dan kekerasan pada remaja	Indeks Pengasuhan Remaja kabupaten Bantul sebesar 88.51 Belum ada trend Indeks Pengasuhan Remaja pada tahun 2024	Peningkatan Peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kampanye kesadaran pengasuhan positif dan komunkasi efektif antara remaja dan orang tua	Peningkatan kesejahteraan psikososial remaja Remaja tumbuh menjadi individu yang sehat secara mental dan sosial Penurunan kasus perilaku beresiko yang dilakukan oleh remaja seperti seks bebas, kekerasan, bullying dan peredaran narkoba

7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Untuk menjamin sampai 100% diperlukan akses terhadap jaminan kesehatan, hal ini memerlukan identifikasi dan penargetan yang tepat terhadap kelompok yang tersisa. Tingkat sosial ekonomi penduduk yang rendah memperngaruhi persepsi dan partisipasi u ntuk kepersertaan mandiri/non-penerima upah. Persepsi dan pengetahuan masyarakat yang kurang terhadap JKN.	Capaian Kepersertaan JKN Kabupaten Bantul sudah mencapai UHC Tahun 2023 97,49 Tahun 2024 98,55 Tahun 2025 99,03 Cakaupan kepesertaan JKN kabupaten Bantul masih lebih rendah daripada capaian DIY yakni sebesar 99,29%	Integrasi Jamkesda ke dalam JKN dan pendaftaran peserta baru secara aktif	Peningkatan Akses Layanan Kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Program JKN melindungi peserta terutama masyarakat miskin dan rentan, hal ini mengurangi risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan. Peningkatan kualitas hidup. Sebagai Dasar pengambilan kebijakan dalam merencanakan dan memgembangkan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di sektor kesehatan

d. Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Kurangnya Optimalnya Partisipasi Masyarakat partisipasi masyarakat dalam menggerakan Kampung Keluarga masih terbatas kepada kesadaran eksternal, dalam artian masyarakat belum sepenuhnya termotivasi untuk mengambangkan Kampung Keluarga Berualitas Pembangunan Kampung KB yang Tidak Merata Pengembangan kampung Keluarga Berkualitas belum memiliki grand design yang kuat, sehingga fokus kampung KB tidak optimal	capaian Kampung KB Mandiri di Kabupaten Bantul tahun 2024 mencapai (77%) Trend DIY belum ada pada 2024	Mengoptimalkan peran dari berbagai pihak, bukan hanya dari PLKB/PKB, akan tetapi dari dinas/instansi lain, universitas, media dan masyarakat	Presentase Kampung KB Mandiri akan semakin meningkat

2	Migrasi Risen Neto (Rate Nett Recent Migrasi) (Proxy : Kepadatan Penduduk)	Pertambahan jumlah penduduk dan migrasi masuk, pembangunan ekonomi, bertambahnya kampus dan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi perumahan	Kepadatan penduduk adalah ukuran yang menggambarkan jumlah orang yang tinggal dalam suatu area tertentu, biasanya dinyatakan dalam jumlah penduduk per kilometer persegi (km^2). Pada tahun 2025, kepadatan penduduk kabupaten Bantul tercatat sebesar 2.005 penduduk/km2 meningkat jika dibandingkan tahun 2024 sebesar 1.989 penduduk/km2. Provinsi DIY karena data yang digunakan DIY yakni kepadatan penduduk DIY tahun 2021 sejumlah 1.165 jiwa per Km2	Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merata, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan	Kepadatan penduduk menjadi lebih merata antar wilayah

e. Penataan Administrasi Data Kependudukan

No	Indikator	Pressure	State	Respon	Impact
1	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	Semua anak 0-4 tahun telah memiliki akta kelahiran dengan adanya kesadaran masyarakat akan arti pentinya akte kelahiran	Kondisi 2024 : Capaian 99,992 % Kondisi 2025 : Capaian 100 % Kemudian apabila dibandingkan, capaian Kabuaten Bantul tahun 2024 lebih tinggi daripada capain DIY sebesar 99.92 %,	kerjasama dengan mitra dalam pelayanan akta kelahiran, layanan kesehatan(RS, klinik, Bidan,Puskesmas) dan petugas registrasi desa di kalurahan	pemenuhan hak sipil anak dan menjadikan masa depan anak 0-4 tahun lebih cerah dengan kepemilikan akta kelahiran yang digunakan untuk sekolah, daftar kerja, pernikahan dll.
2	Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	pelaporan peristiwa perceraian dari masyarakat belum optimal	Capaian Kabupaten Bantul tahun 2024 sebesar 85,68%, masih lebih rendah dibanding dengan capaian DIY yakni sebesar 86..55%	inovasi sipendapa (Sistem Penerbitan Dokumen Kependudukan di Pengadilan Agama. setelah terjadi peristiwa perceraian langsung diterbiitkan KK dan KTP perubahan status kawin menjadi cerai hidup	adanya kepastian hukum mengetahui status dari hubungan pernikahan dan mengetahui status/kondisi anak
3	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	pelaporan untuk menginputkan nomor register dan tanggal pernikahan dari masyarakat belum optimal	Capaian 2024 = 88,71 % Capaian 2025 92,3% Capaian DIY tahun 2024 sebesar 88,92 %	Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengajukan cetak KK yang sudah ada no register dan tanggal pernikahan singkronisasi data dengan kemenag	tertib administrasi mengetahui status dari anak

4	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	Capaian penerbitan akta didasarkan pada laporan kematian yang masuk / dilaporkan keluarga	Tahun 2024 = 100 % Tahun 2025 = 100 % Capaian DIY tahun 2024 yakni 100 %	Bekerjasama dengan petugas register desa dan RT untuk melaporakan kematian sehingga data semakin akurat dan valid untuk kepentingan pembangunan, demokrasi, jaminan kesehatan dan sosial dll	tertib data kependudukan jaminan sosial maupun jaminan layanan masyarakat dapat lebih akurat

f. Isu Strategis Pembangunan Kependudukan

Berdasarkan analisis terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh, maka isu utama yang teridentifikasi di Kabupaten Bantul dari beberapa sasaran adalah:

1. **Pengelolaan Kuantitas Penduduk**

Age Spesific Fertility Rate (ASFR) atau Angka Kelahiran berdasarkan kelompok Umur Ibu

ASFR (Age-Specific Fertility Rate) pada rentang usia 25-29 tahun memiliki hubungan yang signifikan dengan UHH (Usia Harapan Hidup) antara lain :

a. Kesiapan Reproduksi

Pada kelompok usia ini menunjukkan bahwa individu lebih siap secara biologis dan sosial untuk memiliki anak pada usia yang lebih muda. UHH yang baik mencerminkan kesehatan masyarakat yang mendukung kehamilan dan persalinan yang lebih aman.

b. Kesehatan Ibu dan Anak

UHH yang tinggi menunjukkan bahwa sistem kesehatan masyarakat berfungsi dengan baik, yang berkontribusi pada kesehatan ibu dan anak. Ketika ibu berada dalam rentang usia 25-29, mereka lebih berisiko untuk melahirkan dengan komplikasi yang lebih rendah.

c. Sosial dan Ekonomi

Individu dalam rentang usia 25-29 tahun sering kali berada dalam fase karir yang lebih stabil, dan ini kemungkinan besar mencerminkan tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih baik.

d. Kebijakan Publik

Kebijakan yang mendukung keluarga, seperti cuti melahirkan dan akses ke layanan kesehatan, dapat mendukung angka kelahiran di kelompok usia ini.

2. Peningkatan kualitas penduduk

Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih cukup tinggi.

Hal ini disebabkan antara lain oleh sebagian besar masyarakat yang masih bergantung pada bantuan sosial. Fenomena ini mengakibatkan sumber daya pembangunan terkonsentrasi pada masalah tersebut dan belum bisa dialihkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk investasi dalam infrastruktur, pelatihan keterampilan, atau pengembangan usaha kecil, justru untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek.

Konsentrasi pada bantuan sosial juga menciptakan budaya ketergantungan diantara penerima, di mana individu merasa lebih nyaman mengandalkan bantuan daripada mencari cara untuk meningkatkan kapasitas diri. Ini dapat mengurangi motivasi wirausaha dan inovasi yang diperlukan untuk mendongkrak perekonomian lokal.

3. Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, keberhasilan pembangunan keluarga tercermin dengan jelas melalui Indeks Bangga. Indeks ini menjadi alat ukur penting yang menilai berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga partisipasi sosial dan ekonomi.

Keberhasilan pembentukan keluarga yang berkualitas terlihat dari beberapa indikator yang ada dalam Indeks Bangga. Pertama, kesehatan keluarga menjadi salah satu fokus utama. Keluarga yang sehat berkontribusi pada produktivitas masyarakat, sementara akses yang baik terhadap layanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian dan meningkatkan harapan hidup.

Selanjutnya, aspek **pendidikan** juga berperan signifikan. Keluarga yang berhasil mendidik anggotanya menghasilkan generasi penerus yang lebih berdaya saing. Pendidikan yang tinggi membuka peluang kerja yang lebih baik, sehingga mengurangi risiko kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Tidak kalah pentingnya, **partisipasi sosial** dan **ekonomi** dalam komunitas memperkuat jaringan sosial dan

solidaritas. Keluarga yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial cenderung lebih terdorong untuk saling mendukung, baik dalam konteks ekonomi maupun sosial. Ini menciptakan lingkungan yang positif bagi pertumbuhan dan pengembangan individu.

Indeks Bangga juga mengukur **keterlibatan dalam pengambilan keputusan**, yang menunjukkan sejauh mana anggota keluarga terlibat dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keluarga yang mampu berpartisipasi secara aktif dalam proses ini tidak hanya merasa dihargai, tetapi juga lebih berdaya untuk mengubah keadaan mereka.

4. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk

Migrasi Risen Neto (Rate Nett Recent Migrasi) (Proxy: Kepadatan Penduduk).

Pembangunan infrastruktur dan sarana-prasarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang merata menjadi kunci dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Di tengah tantangan migrasi, seperti yang terukur melalui Migrasi Risen Neto (Rate Nett Recent Migration), penting untuk memastikan bahwa setiap aspek pembangunan dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kepadatan penduduk yang meningkat sering kali berdampak pada kebutuhan akan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya menjadi sangat penting. Infrastruktur yang baik tidak hanya menghubungkan berbagai daerah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi urbanisasi berlebihan ke pusat-pusat kota.

Pendidikan adalah pondasi bagi masa depan. Peningkatan kualitas pendidikan harusnya sejalan dengan pembukaan sekolah-sekolah baru dan penguatan fasilitas pendidikan yang ada. Kurikulum yang relevan dan proses belajar yang inovatif akan melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan global. Jadi, kualitas pendidikan yang merata

tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, tetapi juga mengurangi ketergantungan migrasi sebagai solusi untuk mencari pekerjaan.

Di sektor kesehatan, penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat sangat penting. Pembangunan puskesmas dan rumah sakit yang terjangkau dapat membantu memastikan setiap individu memiliki akses yang sama terhadap layanan kesehatan. Kesehatan yang baik akan berkontribusi pada produktivitas masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan.

Pertanian adalah sumber utama pangan dan pendapatan bagi banyak masyarakat. Oleh karena itu alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan sangat penting untuk diminimalisir. Dengan menjaga ketersediaan lahan pertanian kita tidak hanya melestarikan mata pencaharian petani tetapi juga memastikan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan mengintegrasikan pembangunan infrastruktur, pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan, serta pelestarian lahan pertanian, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sinergi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian sumber daya alam, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua, tanpa terkecuali.

5. **Penataan administrasi data kependudukan**

Cakupan kepemilikan akta nikah

Cakupan kepemilikan akta nikah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Keberadaan akta nikah tidak hanya berfungsi sebagai bukti sah pernikahan, tetapi juga membawa implikasi yang lebih luas bagi stabilitas keluarga dan kesejahteraan individu.

Di Bantul, tingkat kepemilikan akta nikah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya legalitas pernikahan. Saat pasangan suami istri memiliki akta nikah, mereka

mendapatkan pengakuan hukum yang melindungi hak-hak mereka, seperti hak waris, hak didik anak, dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan.

Meningkatnya cakupan akta nikah juga berdampak positif pada pencegahan masalah sosial yang sering muncul akibat pernikahan yang tidak tercatat. Sengketa hak dalam keluarga, baik dalam bertahan hidup saat salah satu pasangan meninggal atau dalam hal perceraian, dapat diminimalisir dengan adanya dokumen resmi ini. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan harmonis bagi setiap anggota keluarga.

Lebih jauh lagi, kepemilikan akta nikah memengaruhi akses individu terhadap layanan publik. Banyak program pemerintah, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan, mengharuskan pasangan untuk menunjukkan bukti status pernikahan. Dengan meningkatnya kepemilikan akta nikah, masyarakat di Bantul semakin mudah mengakses layanan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

BAB II
SASARAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2025 – 2029

A. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Pengelolaan Kuantitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Penguatan efektivitas program pengelolaan jumlah penduduk melalui layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, inklusif, dan terjangkau.

2. Strategi

a. Meningkatkan cakupan dan kualitas edukasi kesehatan reproduksi dan seksualitas bagi remaja melalui integrasi kurikulum pendidikan serta penguatan peran komunitas, guna menunda usia kawin pertama dan mencegah kehamilan tidak diinginkan;
b. Mengurangi beban biaya pengasuhan dan pendidikan anak melalui insentif dan program perlindungan sosial, guna mendorong keputusan berkeluarga yang terencana dan pencapaian fertilitas yang seimbang;
c. Sosialisasi dan kampanye program keluarga berencana berbasis budaya lokal dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, dan pemuda, khususnya di wilayah dengan tingkat kelahiran tinggi;
d. Memperluas akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kontrasepsi yang berkualitas, inklusif, dan menyeluruh di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

3. Target 2025-2029

No	Tujuan Strategi	Indikator	Baseline (2024)	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran : Pengelolaan kuantitas penduduk									
1	Mengarahkan laju pertumbuhan penduduk agar tetap seimbang	Total Ferttility Rate (TFR)	*1,75*	Pemuta Khiran PK-24	*1,75*	*1,75*	*1,75*	*1,75*	*1,75*
2		Age-Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun	7,20	Pemuta Khiran PK-24	7,19	7,18	7,17	7,16	7,15
3		Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	71,87	Pemuta khiran PK-24	72	72,2	72,4	72,6	72,8

B. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Peningkatan Kualitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Transformasi sistem pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan mengoptimalkan bonus demografi secara inklusif.

2. Strategi

a. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah;
b. Peningkatan keselarasan antara pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja;
c. Percepatan penurunan stunting melalui intervensi gizi, sanitasi layak, dan edukasi kesehatan masyarakat;
d. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan perlindungan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

3. Target 2025 - 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline (2024)	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran : Peningkatan kualitas Penduduk									
	Pembangunan manusia secara menyeluruh dan inklusif dari aspek pendidikan,	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	9,81	Inventaris Dinas Pendidikan Bantul	9,88	9,96	10,03	10,11	10,18

	kesehatan dan ketenagakerjaan	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) (Proxy : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%))	99,91	BPS	100	100	100	100	100
		Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensi Kerja (Proxy : Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi)	3,54	Inventaris Disnakertrans Bantul	3,56	3,59	3,64	3,69	3,74

		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16,50	Inventaris Dinkes Bantul / e-PPGBM / SSGI	15,50-13,50	15,25-13,25	15,00-13,00	14,75-12,75	14,50-12,50
		Angka Kematian Bayi (AKB) (Proxy : Jumlah Kasus Kematian Bayi)	8,9	Inventaris Dinkes Bantul	8,5	8	7,5	7,0	6,5
		Angka Kematian Ibu (AKI) (Proxy : Jumlah Kasus Kematian Ibu)	84,12	Inventaris Dinkes Bantul	84,00	81,15	78,30	75,45	72,60
		Tingkat Kemiskinan	11,66	BPS	10,75-11,02	9,39-9,67	9,02-9,32	8,66-8,97	8,29-8,63
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	67,15	Inventaris Disnakertrans	67,67-70,17	68,18-70,68	68,70-71,20	69,21-71,71	69,73-72,23
		Persentase Pekerja Informal	52,28	Inventaris Disnakertrans	52,28	52,28	52,28	52,28	52,28

		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	124	BPS / Dinas Sosial	124	124	124	124	124
		Gini Ratio	0,417	Inventaris BAPPEDA / BPS	0,390 - 0,410	0,385- 0,409	0,383- 0,408	0,380- 0,407	0,378- 0,406
		Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	35,84	Inventaris BAPPEDA /BPS	36,99- 38,21	38,27- 40,80	41,01- 43,63	43,42- 46,74	46,11- 50,14
		Tingkat Pengganguran Terbuka	3,62	Inventaris Disnakertrans	3,08-3,58	3,04-3,57	3,00-3,56	2,96-3,54	2,92-3,53
		Persentase Kepemilikan NPWP (Proxy : Persentase Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi)	278	Inventaris Kantor Pajak Pratama Bantul	278	278	278	278	278

C. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Strategi Pembangunan Keluarga

1. Arah kebijakan

Penguatan ketahanan dan fungsi keluarga sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Strategi

a. Edukasi pranikah, literasi keuangan rumah tangga, dan layanan konseling keluarga;
b. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung kebijakan ramah keluarga;
c. Penyediaan layanan dukungan keluarga berbasis komunitas seperti ruang bermain anak dan pusat pembelajaran keluarga;
d. Penguatan peran keluarga dalam pengasuhan dan pembentukan karakter anak;
e. Penguatan ketahanan psikososial keluarga dalam menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan budaya

3. Target 2025 - 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline (2024)	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran : Pembangunan Keluarga									
1		Indeks Pembangunan Keluarga	64,38*	Siperindu	64,50	65,00	65,50	66,00	66,20

		(IBangga)							
2		Indeks Perlindungan Anak	70,20*	Inventaris Data DP3APPKB	70,25 - 70,35	70,35 - 71,50	70,40 - 71,55	70,45 - 71,60	70,50 - 71,65
3	Meningkatkan kualitas keluarga untuk menciptakan rasa aman, tentram, dan masa depan yang sejahtera dan bahagia	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	99,09	Inventaris DPUPKP Bantul	99,09	99,14	99,18	99,23	99,27
4		Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman (%)	25,25	Inventaris DPUPKP Bantul	25,51	25,78	26,06	26,35	26,65
5		Indeks Lansia Berdaya	57,97	Pemutakhiran PK-24 / Inventaris DP3APPKB Bantul	59,3	60,7	62,1	63,5	65
6		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	88,51	Inventaris Data DP3APPKB	88,80	89,10	89,40	89,70	90,00
7		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	98,55	BPJS	98,56	98,57	98,58	98,59	98,60

D. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

1. Arah Kebijakan

Peningkatan kualitas hidup di kawasan perkotaan dan perdesaan melalui pemerataan pembangunan, penataan penduduk, dan tata ruang berkelanjutan.

2. Strategi

a. Revitalisasi kawasan perdesaan dengan penyediaan layanan dasar yang merata,pembangunan infrastruktur wilayah, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi desa;

b. Penataan ruang perkotaan secara adaptif dan berkelanjutan melalui penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan permukiman padat, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

3. Target 2025 – 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline (2024)	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran : Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk									
1	Distribusi penduduk yang	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	66,67	Inventaris Bidang Dalduk	70,10	73,70	77,50	81,40	85,60

2	seimbang secara spasial, ekologis dan sosial	Migrasi Risen Neto (Rate Nett Recent Migrasi) (Proxy : Kepadatan Penduduk)	1915	BPS	1945	1974	2003	2033	2064

E. Arah Kebijakan, Strategi dan Target Penataan Administrasi

Data Kependudukan

1. Arah Kebijakan

Mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta di kelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah di akses oleh pemangku kepentingan.

2. Strategi

a. Pelayanan prima administrasi kependudukan;
b. Tertib administrasi kependudukan;
c. Integrasi data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber;
d. Peningkatan pendayagunaan data dan informasi kependudukan

3. Target 2025 - 2029

No	Tujuan Strategis	Indikator	Baseline (2024)	Sumber Data	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran : Penataan administrasi data kependudukan									
1	Memperluas cakupan administrasi	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	99,99 %	Inventaris Disdukcapil	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %	99,99 %
2		Cakupan	100%	Inventaris	100%	100%	100%	100%	100%

	kependudukan untuk mendukung kebijakan pembangunan berbasis data	(Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai		Disdukcapill					
3		Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	88,71%	Inventaris Disdukcapil	88,72 %	88,73 %	88,74 %	88,75 %	88,76 %
4		Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	100 %	Inventaris Disdukcapil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB III
RENCANA AKSI TAHUN 2025 – 2029

A. Tata Kelola Pembangunan Kependudukan

Tata kelola pembangunan kependudukan merupakan serangkaian mekanisme, proses, dan kelembagaan yang bertujuan untuk mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan kependudukan di daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Tata kelola ini menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kebijakan serta program pembangunan kependudukan. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terencana dan terpadu melalui kolaborasi berbagai sektor terkait.

Di Kabupaten Bantul, dalam rangka tata kelola pembangunan kependudukan telah dibentuk dan ditetapkan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK dengan Keputusan Bupati Bantul Nomor 681 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Bantul, yang merupakan wadah koordinasi lintas sektor. Tim ini bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi pelaksanaan GDPK secara efektif, terintegrasi, dan terpadu. Pelaksanaan tugas dilakukan dengan melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan. Struktur dan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten sebagai berikut:

1. Pengarah : Bupati Bantul
2. Ketua : Sekretaris Daerah
3. Wakil Ketua : Kepala Bappeda
4. Sekretaris : Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana.

Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Bantul
Anggota	1. Statistisik Muda 2. Penata Kependudukan Ahli Muda pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan 4. Perencana Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk

Koordinator	Kepala Bidang Pemerintahan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Manusia pada Bappeda Kabupaten Bantul
Anggota	1. Pranata Humas pada Kementerian Agama 2. Kepala Seksi Gizi, Kesehatan Keluarga dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul 5. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Penempatan Tenaga kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

	6. Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 7. Kepala Bidang Usaha Mikro pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul
Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk	
Koordinator	Kepala Bidang Penempatan Tenaga kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
Anggota	1. Penata Kependudukan Ahli Muda pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Bantul 2. Perencana Ahli Muda pada Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul 3. Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Pertama pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga	
Koordinator	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Bantul

Anggota	1. Pranata Humas pada Kementerian Agama 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul 3. Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Pert pada Dinas Pekerjaan Um Perumahan, dan Kawa Permukiman Kabupaten Bantul

Kelompok Kerja Bidang Penataan Administrasi Kependudukan

Koordinator	Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
Anggota	1. Statistisi Muda pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul 2. Statistisi Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Sekretariat Tim

Ketua	Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Bantul
Anggota	1. Kepala Sub Bagian Umum pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Bantul 2. Unsur DP3AP2KB Kabupaten Bantul

RINCIAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN *GRAND DESIGN* PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN (GDPK) KABUPATEN BANTUL

1. Ketua :

   Mempunyai tugas memberikan pengarahan, pembinaan, pemikiran dan pendapat serta menetapkan kebijakan dalam koordinasi pelaksanaan GDPK sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta agenda Perencanaan Daerah.

2. Wakil Ketua :

   Mempunyai tugas membantu ketua dalam memberikan pengaraham, pembinaan, pemikiran dan pendapat dalam koordinasi pelaksanaan GDPK.

3. Sekretaris

   Mempunyai tugas memfasilitasi dalam hal administrasi untuk mendukung pelaksanaan tugas tim dalam koordinasi pelaksanaan GDPK

4. Kelompok Kerja Bidang Pengendalian Kuantitas Penduduk

Mempunyai tugas mengelola jumlah penduduk agar seimbang dengan ketersediaan sumber daya melalui pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengaturan mobilitas.

5. Kelompok Kerja Bidang Peningkatan Kualitas Penduduk
   Mempunyai tugas meningkatkan kualitas penduduk melalui fasilitas dan aksesibilitas kesehatan, pendidikan, pembangunan karakter bangsa, peningkatan nilai agama, peningkatan perekonomian dan peningkatan sosial budaya agar penduduk mempunyai kualitas tinggi, berdaya saing dan berkarakter.
6. Kelompok Kerja Bidang Pembangunan Keluarga
   Mempunyai tugas membangun keluarga yang berkualitas sejahtera lahir dan batin sebagai unit dasar dalam pembangunan sosial.
7. Kelompok Kerja Bidang Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk
   Mempunyai tugas merencanakan penyebaran penduduk yang lebih merata di berbagai wilayah dan mengelola mobilitas penduduk.
8. Kelompok Kerja Bidang Penataan Administrasi Kependudukan.
   Mempunyai tugas memastikan data kependudukan yang akurat dan tertib administrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan.
9. Sekretariat Tim
   Mempunyai tugas melaksanakan fungsi – fungsi fasilitasi dalam penyelenggaraan yang terkait kesekretariatan Tim.

Selanjutnya terkait penyusunan PJPK yang merupakan penjabaran strategis dari GDPK, maka Tim Koordinasi GDPK bertugas mengoordinasikan penyusunan serta implementasi PJPK, memastikan sinkronisasi lintas sektor dan integrasi isu kependudukan ke dalam perencanaan pembangunan daerah

(RPJMD, RKPD) agar tujuan pembangunan kependudukan dapat tercapai. GDPK adalah payung besarnya (jangka panjang 25 tahun), sementara PJPK adalah peta jalan per 5 tahunan yang detail. Tim koordinasi memastikan semua dinas terkait (Dukcapil, BKKBN, BPS, dll.) bekerja sama menyusun dan menjalankan rencana tersebut.

Tugas penyusunan serta implementasi PJPK meliputi :

1. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan PJPK;
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program serta kegiatan pembangunan kependudukan antar sektor terkait Melakukan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan PJPK;
3. Mengevaluasi pelaksanaan PJPK;

B. Rencana Aksi Tahun 2025 – 2029

1. Rencana Aksi Pengelolaan Kuantitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	TFR	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerahprovinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangkapengendalian Kuantitas Penduduk Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasikemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaanpelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie)Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP3APPKB	Dinsos, Dinkes
2	Age-Specific Fertility Rate (ASFR)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	DP3APPKB	Dinkes, Dinsos
3	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obatkontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Kb Di Daerah Kabupaten/Kota	DP3APPKB	Dinkes, Puskesmas, PMB

2. Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Program Peningkatan Rata-rata lama Penduduk usia 15 Tahun ke Atas	1. Pemberian bantuan pendidikan berupa :Beasiswa bagi siswa dari keluarga misikin melalui Kartu Indonesia Pintar (anggaran dari Pusat) 2. BOSP (Anggaran dari pusat) 3. BOSDA (Anggaran dan Pemda)	DIKPORA	BPS, DIKMEN, Kemenag
2	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%) (Proxy : Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (%))	Program Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi	Optimalisasi Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B, C) dengan memperluas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM)	Dikpora	Disdukcapil, Kemenag
3	Jumlah Tenaga Kerja yang Tersertifikasi Kompetensi Kerja (Proxy : Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnakertrans	LPK Swasta, BPVP Bantul

	Menengah Tinggi)				
4	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	Bappeda	Dinkes, DP3APPKB, DPMKal, Kapanewon, Kalurahan,
5	Angka Kematian Bayi (AKB) (Proxy :Jumlah Kasus Kematian Bayi)	Program Pencegahan Kasus Kematian pada Bayi	Peningkatan kapasitas petugas, rujukan terencana bagi ibu hamil berisiko, revisi manual rujukan,, audit kasus kematian bayi dan membuat rekomendasi, peningkatan sarpras yankes pelayanan bayi	Dinkes	Dinsos, Rumah Sakit Swasta, Rumah sakit milik pemerintah
6	Angka Kematian Ibu (AKI) (Proxy : Jumlah Kasus Kematian Ibu)	Program Pencegahan Kasus Kematian pada Ibu Hamil	Optimalisasi puskesmas dengan pendampingan SPOG ada diskusi untuk kasus berat meliputi dokter, bidan perawat, psikolog. Revisi manual rujukan. bantuan pembiayaan dengan jamkesda, pemantauan ibu hamil dan nifas kolaborasi dengan kader	Dinkes	Dinsos, DP3APPKB, Rumah Sakit Swasta, Rumah sakit milik pemerintah
7	Tingkat Kemiskinan	Program Penanggulangan Kemiskinan	▪ Program keluarga harapan (PKH) ▪ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ▪ Program Jaminan Kesehatan/Subsidi iuran Jaminan Kesehatan (PBI- APBD) ▪ Bantuan permakanan dan sandang bagi lansia, anak terlantar, dan disabilitas ▪ Bantuan langsung tunai (BLT) dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ▪ Bantuan Sosial untuk wanita rawan Sosial Ekonomi (WRSE) ▪ Bantuan Sosial Sambung Pangan	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, Disdukcapil, Disdikpora, DPMKal, DKUKMP, DPUPKP, Kapanewon, Kalurahan

			Bantul		
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnakertrans	LPK Swasta, BPVP
9	Persentase Pekerja Informal	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi; Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta; Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnakertrans	BPS, BPVP, LPK Swasta
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	Program Penempatan Tenaga Kerja	Kegiatan Pelayanan antar kerja	Disnakertrans	Dinsos
11	Gini Ratio	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	BPS, Disnakertrans, DKPP, DPUPKP
12	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bappeda	DKPP, DKP, DKUKMPP, DISPAR
13	Tingkat Pengganggguran Terbuka	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial (Program	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Kegiatan Pelayanan antar kerja; Pengelolaan informasi Pasar Kerja; pelindungan PMI Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan; Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan	Disnakertrans	DKUKMPP, Dinas Pariwisata, DKP, Disdikpora

		Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan); Kegiatan Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya); (kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah)		
14	Persentase Kepemilikan NPWP (Proxy : Persentase Penambahan wajib pajak hasil ekstensifikasi)	Optimalisasi Penambahan WP Potensial	Kegiatan Pengumpulan Data (KPD) untuk penambahan WP baru potensial dan optimalisasi kanal digital untuk mempermudah pendaftaran NPWP dan memperluas jangkuan layanan	KPP Pratama	Disdukcapil

3. Rencana Aksi Pembangunan Keluarga

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pemaduan Dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerahprovinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka pengendalian Kualitas Penduduk Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasikemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaanpelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Ber- Kb Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie)Pengendalian Penduduk Dan Kb Sesuai Kearifan Budaya Lokal	DP3APPKB	DPMKal Dinkes

2	Indeks Perlindungan Anak	Program Pemenuhan HAK Anak Program Perlindungan Khusus Anak	Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia USaha Kewenangan Kab/Kota Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota Penguatan ndaj Pengembangan Lembaga penyedia Peningkatan kualitas hidup anak Penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kab/kota Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	DP3APPKB	Dikpora, Kalurahan
3	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)	Program Penanganan RTLH dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya	Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kolaborasi dengan sektor swasta dan CSR	Dinas PU	Baznas

4	Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman(%)	Program peningkatan Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	Penguatan kelembagaan untuk pembangunan sanitasi Permukiman atau program serupa yang berfokus pada pembangunan IPAL komunal dan SPALD Terpusat. * Penyediaan tangki septik onsite yang kedap dan ramah lingkungan melalui bantuan pemerintah (septic tank individual atau komunal). * Sosialisasi perubahan perilaku terkait kebersihan dan sanitasi Penguatan kelembagaan penyediaan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) dan Layanan Lumpur Tinja Tidak Terjadwal (L2T3) di SPALD-T Sewon dan SPALD-T Bambanglipuro	Dinas PU	Pemerintah Kalurahan, Balai PALPJK, BPBPK DIY, Balai teknik sanitasi, Sekber kartamantul
5	Indeks Lansia Berdaya	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan kesejahteraan Keluarga Sekolah Lansia/Bina Keluarga Lansia	DP3APPKB	DPMKal

6	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Bina Keluarga Remaja	DP3APPKB	DPMKal, DIKPORA
7	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dinkes	Dinas sosial,

4. Rencana Aksi Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kampung KB	DP3APPKB	Kalurahan DPMkal
2	Migrasi Risen Neto (Rate Nett Recent Migrasi) (Proxy : Kepadatan Penduduk)	Pengendalian penduduk	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	BPS/BAPPEDA	DP3APPKB

5. Rencana Aksi Penataan Administrasi Data Kependudukan

No	Indikator	Program	Kegiatan	Instansi Utama	Instansi Pendukung
1	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kelahiran Balita (0-4 tahun)	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Rumah Sakit
2	Cakupan (Persentase) penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Pengadilan Agama
3	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Nikah	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	Disdukcapil	Kemenag
4	Cakupan (Persentase) Kepemilikan Akta Kematian bagi Penduduk yang Meninggal	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL	Kalurahan

BAB IV
PENUTUP

A. Monitoring

Pemantauan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan merupakan bagian penting dalam menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan ini mencakup pengawasan terhadap indikator-indikator dan rencana aksi dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan. Pemantauan dilakukan secara berkala (triwulanan/ semester).

Pemantauan pelaksanaan PJPK dilakukan melalui sistem pengawasan terintegrasi yang mencakup pemantauan kemajuan terhadap pencapaian target, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta efisiensi penggunaan sumber daya. Kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan atau kendala yang muncul, sekaligus merumuskan rekomendasi yang bersifat korektif atau adaptif.

B. Evaluasi

Evaluasi elemen penting dalam proses pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. Evaluasi bertujuan untuk menilai kinerja implementasi dan akuntablitas pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi memungkin pemerintah daerah untuk mengidentifikan tingkat pencapaian indikator, mengukur dampak kebijakan dan program serta mengungkap hambatan dalam pelaksanaan.

Evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksana GDPK/PJPK minimal 1 kali dalam setahun dengan menjelaskan capaian dari suatu program. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyusun rekomendasi agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat lebih efektif dan efisien.

C. Pelaporan

Pelaporan dilakukan untuk mendokumentasikan hasil pemantauan dan evaluasi, serta menyampaikan informasi kepada pihak terkait guna pengambilan keputusan yang lebih baik. Pelaporan ini menjadi dasar bagi pemangku kebijakan dalam menyusun strategi pembangunan kependudukan yang lebih baik dan berkelanjutan. Pelaporan dilakukan untuk menjelaskan hasil monitoring dan evaluasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dan Rencana Aksi yang telah disusun. Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada kepala daerah selaku pimpinan tertinggi eksekutif dalam pemerintahan daerah.

BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH